

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

*Membangun Karakter Bangsa Melalui Pemanjapan
Kebudayaan Nasional dan Kesadaran Historis*

FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Semarang, 30 Mei 2012



Badan Penerbit Universitas Diponegoro

ISBN: 978-602-097-277-0

DAFTAR MAKALAH
PROSIDING SEMINAR NASIONAL
“Membangun Karakter Bangsa Melalui Pemantapan Kebudayaan
Nasional dan Kesadaran Historis”

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
Semarang – 30 Mei 2012

1.
Franz Magnis Suseno, SJ
“Erika Bangsa Berbudaya di Abad Ke-21: Kebutuhan Kalau
Indonesia Mau Maju”
Halaman 1-9

2.
Singgih Tri Sulistyono
“Kesadaran Sejarah, Budaya Lokal, dan Rekayasa Kebudayaan
Nasional dalam Konteks Penguatan Karakter Kebangsaan”
Halaman 10-23

3.
Sutan Syahrir Zabda
“Pendidikan Karakter Bangsa Sebagai Upaya Aktualisasi Pancasila
Sebagai *Weltanschauung* dan *Staats Philosophische Grondslag*”
Halaman 24-29

4.
Ika Dewi Retno Sari
“Implementasi Pendidikan Multikultural di Indonesia (Membangun
Bangsa Berkarakter)”
Halaman 30-37

5.
Suyahman
“Membangun Karakter Bangsa Lewat Kebudayaan Nasional dan
Kesadaran Historis”
Halaman 38-49

KESADARAN SEJARAH, BUDAYA LOKAL, DAN REKAYASA KEBUDAYAAN NASIONAL DALAM KONTEKS PENGUATAN KARAKTER KEBANGSAAN*

Oleh:
Singgih Tri Sulistiyono**
singgihtrisulistiyono@yahoo.com

A. PENDAHULUAN

Semenjak Polemik Kebudayaan Nasional yang berlangsung pada tahun 1930-an dan perdebatan fungsi kebudayaan dalam penyelesaian revolusi nasional pada tahun 1960-an berakhir, tidak lagi dijumpai polemik, perdebatan, dan diskusi kebudayaan yang mampu “menandingi” gaungnya baik dari sisi bobot, orisinalitas gagasan, maupun spektrum *jangkauan pengaruhnya*. Memang ada upaya-upaya untuk menyusun strategi kebudayaan nasional selama masa pemerintahan Orde Baru namun hal itu kurang memberikan dampak yang fundamental bagi perkembangan dari apa yang dibayangkan mengenai kebudayaan nasional. Hal itu terbukti ketika pemerintah Orde Baru runtuh, segera disusul pula dengan keroposnya “bangunan” kebudayaan nasional menyusul pecahnya gerakan reformasi dan otonomi daerah. Masa reformasi dan otonomi daerah menyaksikan desain bangunan kebudayaan nasional yang dirancang sebelumnya mengalami proses deformasi ketika euforia reformasi dan otonomi daerah telah mendorong daerah-daerah untuk lebih menonjolkan kebudayaan daerah daripada memikirkan apa yang dicita-citakan sebagai kebudayaan nasional.

Pada awal reformasi, wacana mengenai kebudayaan nasional hampir tidak pernah disinggung, sebaliknya wacana kebudayaan lokal dan etnis terus berkembang.¹⁰ Di beberapa daerah, revitalisasi budaya lokal dan etnik tampak sebagai upaya antitesis terhadap proses dominasi kebudayaan nasional yang didorong oleh pemerintah pusat. Mereka mulai khawatir akan kehilangan identitas lokal dan/atau etnik, sehingga reformasi dan otonomi daerah dimanfaatkan sebagai momentum untuk merevitalisasi budaya lokal dan/etnik. Sementara itu ada juga beberapa daerah yang mengembangkan budaya lokal sebagai bagian dari upaya politis untuk melepaskan diri dari bingkai NKRI.

Proses tersebut di atas dengan cepat ditunjukkan oleh berbagai kejadian yang dengan jelas mencerminkan adanya peningkatan eskalasi fanatisme etnisitas dan kelompok yang ditunjukkan dengan terjadinya konflik-konflik yang bernuansa suku bangsa, agama, ras, dan antarkelompok. Persoalan itu semakin bertambah rumit sejalan dengan berkembangnya

* Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Membangun Karakter Bangsa melalui Pemantapan Kebudayaan Nasional dan Kesadaran Historis” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro (Semarang, 30 Mei 2012).

** Guru Besar Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Jawa Tengah.

¹⁰ Hal serupa juga terjadi dalam khazanah historiografi Indonesia ketika sejumlah sejarawan meninggalkan konsep “sejarah nasional”, lihat Singgih Tri Sulistiyono, “Historiografi Pembebasan: Suatu Alternatif”, makalah disampaikan pada *Seminar Akademik dengan Tema Historiografi Indonesia Modern* yang diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta: 29 Desember 2009).

semangat “putra daerah” yang seringkali dijadikan kedok sebagai media untuk mengakses kekuasaan politik dan keuntungan ekonomi tanpa banyak mempertimbangkan eksese-eksese berkembangnya semangat kedaerahan dan primordialisme yang mengancam proses integrasi nasional.

Paling tidak ada dua kemungkinan untuk menangani kondisi tersebut di atas: **pertama**, dibiarkan secara alamiah yang memungkinkan terjadinya tumbuh kembangnya kesetiaan primordial kesukuan di atas rasa kebangsaan karena kesetiaan terhadap suku bangsa merupakan sesuatu yang lebih alamiah jika dibandingkan dengan kesetiaan terhadap bangsa mengingat bahwa entitas negara-bangsa yang plural merupakan hasil sebuah rekayasa.¹¹ **Kedua**, perlu adanya *policy* yang memungkinkan campur tangan negara yang bisa juga melibatkan pejabat-pejabat negara dan tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut menentukan arah perjalanan kebudayaan bangsa di masa yang akan datang. *Policy* ini seringkali disamakan dengan strategi kebudayaan atau mungkin bisa disebut sebagai rekayasa kebudayaan atau *cultural engineering*. Hal ini terkait erat dengan kenyataan bahwa apa yang disebut sebagai kebudayaan nasional sesungguhnya masih merupakan “*imagined cultur*” atau sebuah bentuk kebudayaan yang dicita-citakan.

Dengan menggunakan perspektif historis dan kultural, makalah ini akan berfokus pada wacana rekayasa kebudayaan nasional dalam kaitannya dengan fungsi dan peran kebudayaan daerah dalam konteks pembangunan bangsa yang berkarakter. Untuk itu ada beberapa isu yang akan dibahas, yaitu gejala amnesia historis (pelupaan sejarah atau ketiadaan kesadaran sejarah) sebagai sumber persoalan kebangsaan, kedudukan *local wisdom* dalam konteks kebudayaan nasional sebagai sumber nilai-nilai karakter bangsa, serta wacana rekayasa kebudayaan nasional.

B. DIVERSITAS: ANTARA POTENSI DAN PERSOALAN

Memang pluralitas masyarakat Indonesia dapat dilacak dari perjalanan historis berbagai komunitas yang mendiami kepulauan Nusantara.¹² Kajian geomorfologi menemukan bahwa kepulauan Nusantara telah terbentuk sejak sepuluh juta tahun sebelum *homo sapiens* yang dipandang merupakan nenek moyang langsung dari manusia modern yang menghuni kawasan ini. Sisa-sisa fosil di lembah Bengawan Solo Jawa Tengah dan Jawa Timur memberikan petunjuk bahwa keberadaan *hominid* sudah ada sejak sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Penemuan sisa-sisa manusia purba (yang kemudian disebut sebagai “Manusia Jawa”) oleh Eugene Dubois di Trinil di Jawa Timur pada tahun -1891 ini memiliki peran dalam mengarahkan perhatian para ilmuwan dunia dalam pencarian mereka terhadap asal-usul manusia.

Dalam hal ini apakah “Manusia Jawa” merupakan nenek moyang manusia pertama (*Homo Sapiens*) dari masyarakat di kepulauan Indonesia masih belum dapat dipastikan, meskipun sisa-sisa manusia Jawa lainnya ditemukan sampai sekitar 100.000 tahun yang lalu yang mewakili masa transisi antara *Homo Erectus* dan manusia awal yang sesungguhnya, yang jejaknya paling awal berasal dari sekitar 40.000 tahun yang lalu. Para paleontolog juga menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk meragukan bahwa mereka merupakan manusia pertama dari kelompok etnis yang luas yang sekarang kita sebut Australo-Melanesia dan

¹¹ Bandingkan dengan Birch yang menyatakan bahwa bilingualism merupakan sesuatu yang *unnatural*. Lihat Anthony H. Birch, *Nationalism and National Integration*. London: Unwin Hyman, 1989.

¹² Sebagian besar bagian ini disarikan dari Robert Cribb, *Historical Atlas of Indonesia* (Curzon: Richmond, Surrey, 2000).

bahwa mereka adalah nenek moyang dari Melanesia di Papua Nugini, suku Aborigin Australia dan masyarakat kecil Negrito di Semenanjung Melayu dan Filipina.

Para pakar geomorfologi menyatakan bahwa iklim global telah berubah beberapa kali selama 40.000 tahun terakhir dan perubahan ini memiliki pengaruh yang besar terhadap manusia purba. Sebagai pemburu dan pengumpul, mereka mungkin melakukan yang terbaik di hutan yang relatif terbuka, sepanjang pantai dan di pinggiran hutan hujan tropis. Oleh karena kenaikan permukaan air laut setelah berakhirnya zaman es terakhir, yaitu sejak sekitar 17.000 tahun yang lalu, pemukiman manusia tampaknya telah terkonsentrasi di kawasan yang kering di bagian timur Nusantara. Pada sekitar tahun 7000 SM di dataran tinggi New Guinea, Melanesia mereka membuat terobosan teknologi dengan pembangunan pertanian berdasarkan talas, tebu, pandan, dan pisang. Kawasan pertanian berkelanjutan dihuni oleh penduduk yang jauh lebih padat dibandingkan dengan kawasan berburu dan mengumpulkan makanan. Terobosan teknologi ini semakin memperkuat kehadiran Melanesia di bagian timur Nusantara.

Sebaliknya, bagian barat dan tengah kepulauan Nusantara mungkin memiliki penduduk relatif sedikit di sekitar 3000 SM, ketika orang-orang Mongoloid dari daratan Cina Selatan, yang disebut sebagai bangsa Austronesia, mulai bergerak ke selatan dalam jumlah yang cukup besar. Orang-orang Austronesia membawa teknologi mereka seperti kemampuan untuk membuat tembikar, kano cadik, dan busur dan anak panah, serta babi peliharaan, unggas dan anjing, dan mereka membudidayakan beras dan tanaman sejenis gandum (*millet*), bersama dengan tanaman lainnya. Pada waktu itu beras dan *millet* cocok untuk ditanam di daerah beriklim tropis dan sub-tropis, dan pada awalnya mereka tampaknya tidak menjadi penghuni tetap di kepulauan Indonesia. Kebiasaan makan orang Austronesia dari daerah asal mereka adalah talas, sukun, pisang, ubi, sagu, dan kelapa.

Gelombang diaspora Austronesia dibagi menjadi dua di pantai New Guinea. Beberapa dari mereka terus bermigrasi ke jangkauan timur Fiji dan Tonga sekitar 1500 SM dan terus mengeksplorasi Pasifik dan menghuni Polinesia mencakup wilayah luas yang membentang sejauh Selandia Baru, Pulau Paskah, dan Hawaii. Diaspora Austronesia ke barat akhirnya mencapai Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Melayu dan sebagian menetap di Asia Tenggara daratan dan menjadi nenek moyang dari Champa yang masih merupakan minoritas kecil di selatan Vietnam. Pada periode berikutnya, serangkaian diaspora yang dimulai sekitar abad kelima Masehi dan berakhir pada abad kedua belas, orang-orang Austronesia bermukim di pulau tak berpenghuni Madagaskar. Penyebaran bangsa Austronesia yang membentang lebih dari setengah keliling bumi ini adalah salah satu diaspora manusia yang paling spektakuler sebelum era modern.

Pada awalnya mungkin diaspora Austronesia di Nusantara dapat berbicara dalam satu bahasa. Namun, selama berabad-abad mereka saling kehilangan kontak sehingga dalam proses sejarah mereka mengembangkan bahasa mereka ke arah yang berbeda. Bahasa dapat berubah dengan cepat meskipun munculnya dialek masih dapat dengan mudah memahami satu sama lain dalam beberapa abad. Namun, hampir tidak ada catatan proses perubahan bahasa di Nusantara sebelum 1800-an. Di Indonesia modern, ada sekitar 200 rumpun bahasa Austronesia, dan lebih dari 150 keluarga bahasa Papua (Melanesia).

Setelah memasuki abad Masehi ketika hubungan antara pulau-pulau menjadi semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi perkapalan dan pengembangan perdagangan maritim, hubungan antarkelompok etnis di Nusantara menjadi semakin intens. Hal ini juga berdampak pada pengembangan bahasa di Nusantara. Perkembangan menarik terjadi pada bahasa Melayu sebagai nenek moyang langsung dari bahasa Indonesia. Sejak abad ke-15, Melayu telah menjadi bahasa yang dominan dari daerah pesisir di Nusantara. Dominasi ini terutama berkaitan dengan kegiatan komersial yang meningkat sejak munculnya kekuatan Islam di Timur Tengah dan daerah di sebelah timur. Dalam konteks itu, Melayu adalah

bahasa yang paling penting untuk perdagangan di Nusantara. Selain itu, bahasa Melayu juga sangat berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Melayu adalah bahasa dari Kerajaan Malaka di Semenanjung Melayu. Melayu juga menjadi bahasa utama dari orang Muslim karena sudah menyebar ke arah timur. Akhirnya, Melayu menjadi *lingua franca* di Nusantara. Namun, setiap suku masih menggunakan bahasa dan dialek mereka sendiri ketika berkomunikasi di antara mereka. Jadi, faktor sejarah dan keterpisahan geografis telah menyebabkan terbentuknya pluralitas masyarakat Indonesia.

Pada zaman kolonialisme Belanda, diversitas kelompok etnik dan budaya di Hindia Belanda dipelihara. Bahkan sentimen antarkelompok etnik dibangkitkan dan dipertajam. Hal itu bisa dilihat antara lain dari pembagian wilayah administratif yang didasarkan juga atas area budaya suku bangsa, seperti pembagian provinsi Jawa Barat (Mayoritas Sunda), Jawa Tengah (Jawa kraton), dan Jawa Timur (Jawa dengan pengaruh pesisir dan Madura yang kuat).¹³ Selain itu, politik adu domba Belanda juga memperuncing sentimen antaretnik. Hal itu terlihat dengan jelas ketika pemerintah kolonial Belanda melakukan pemadaman perlawanan di suatu daerah etnik tertentu akan merekrut serdadu dari kelompok etnik yang lain. Sebagai contoh adalah pada waktu Belanda memadamkan perlawanan rakyat Aceh pada pergantian abad XX dengan menggunakan pasukan yang paling terlatih dan paling modern serta sekaligus paling kejam yang disebut *Marechaussee*.¹⁴ Pasukan ini kebanyakan terdiri dari orang-orang Jawa dan Ambon.¹⁵ Politik "devide et impera" ini juga diterapkan oleh pemerintah kolonial dalam mengatasi persoalan pergerakan nasional Indonesia pada awal abad XX ketika segenap elemen kawula Hindia Belanda mencoba untuk membangun sebuah bangsa baru, yaitu bangsa Indonesia. Jadi dengan demikian pluralitas masyarakat Indonesia di samping merupakan potensi keunikan juga sekaligus memiliki potensi perpecahan. Namun demikian sejarah menunjukkan bahwa justru karena sadar akan pluralitas itulah para elit Indonesia pada waktu itu memiliki semangat untuk membangun komitmen sebagai sebuah bangsa.

C. MERUMUSKAN HARAPAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia merupakan hasil sebuah kesepakatan dan sekaligus hasil dari sebuah rekayasa. Namun demikian, kesepakatan itu tentu saja tidak datang secara tiba-tiba namun melalui sebuah proses yang panjang. Kesepakatan itu terjadi justru karena keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia yang bersumber dari sejarah. Perkembangan sejarah itu pula yang memungkinkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan dalam proses formasi bangsa Indonesia. Kongres Pemuda II yang berlangsung pada bulan Oktober 1928 sebetulnya hanyalah merupakan salah satu puncak dari kesepakatan-kesepakatan untuk hidup bersama sebagai sebuah bangsa. Salah satu isi Sumpah Pemuda itu menyatakan untuk menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Sumpah itu sendiri secara inheren membuktikan bahwa apa yang kemudian disebut sebagai bangsa Indonesia secara formal belum ada, meskipun secara sosial-budaya proses "menjadi Indonesia" itu sudah berkembang dan tahun 1928 hanyalah merupakan puncaknya.

¹³ Cara berpikir seperti ini tanpa sadar juga diwarisi oleh pemerintah RI. Bahkan pada periode reformasi ini cara berpikir kolonial bangkit lagi dengan subur yang dapat dilihat dari fenomena pemekaran provinsi dan kabupaten yang didasarkan atas kepentingan suku bangsa tertentu.

¹⁴ Lihat Paul van 't Veer, *Perang Belanda di Aceh (Penerjemah Aboebakar)* (Banda Aceh: Dinas P dan K daerah Istimewa Aceh, 1977), hlm. 205-210.

¹⁵ Barangkali kebijakan seperti ini menjadi salah satu pemicu sentimen orang Aceh terhadap orang Jawa. Bahkan hal itu berlangsung hingga konflik Aceh pada masa pascakemerdekaan.

Sumpah Pemuda yang dihadiri oleh “perwakilan” dari berbagai kelompok suku bangsa (Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Celebes, dan lain-lain) dan kelompok ideologis seperti Jong Islamieten Bond waktu itu menunjukkan bahwa ketika bersepakat mereka sudah menyadari bahwa mereka merupakan masyarakat plural. Namun demikian justru karena pluralitas itulah yang mendorong mereka bersepakat untuk membentuk Indonesia sebagai sebuah bangsa yang akan diwujudkan bersama-sama. Jadi pada waktu itu sudah ada kesadaran di antara para elit pribumi mengenai realitas latar belakang pluralitas dalam masyarakat dan keinginan mereka untuk hidup bersama sebagai bangsa.

Barangkali pengungkapan hasrat untuk hidup bersama sebagai satu bangsa mungkin tidak terlalu sulit. Apalagi tahun 1928 itu merupakan masa-masa puncak dari gelora semangat nasionalisme dan antikolonialisme setelah pemerintah kolonial Belanda secara telanjang melakukan tindakan represif terhadap gerakan perlawanan massa yang dipimpin oleh PKI dan sikap pemerintah kolonial Belanda yang jelas-jelas over-represif terhadap pergerakan nasional yang dipimpin oleh Sukarno yang berujung pada pemenjaraan tokoh ini. Fenomena tersebut tampaknya menjadi pemicu berkembangnya rasa nasionalisme Indonesia dan kesadaran untuk mempersatukan semua potensi masyarakat Hindia Belanda untuk menghadapi Belanda.

Sementara gerakan-gerakan politik mencapai prestasi dan kematangan dengan adanya ikrar untuk menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda, para budayawan barangkali justru melangkah lebih maju.¹⁶ Setelah mengalami masa-masa sulit sebagai dampak depresi besar pada awal tahun 1930-an, para budayawan tergerak untuk memikirkan masa depan kebudayaan Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928. Para tokoh pergerakan nasional pada tahun 1930-an (baik budayawan maupun politisi) tersebut merumuskan berbagai hal yang terkait dengan bangsa Indonesia di masa yang akan datang khususnya yang terkait dengan kebudayaan Indonesia.

Kesepakatan untuk menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia telah dicapai pada tahun 1928, namun mereka belum merumuskan bagaimana wajah Indonesia di masa depan. Dalam hubungan itulah sejak awal tahun 1930-an itu mulai muncul ide-ide untuk mengkonstruksi Indonesia di masa yang akan datang. Bagi para pejabat kolonial, mungkin gagasan-gagasan para tokoh pergerakan nasional dipandang sebagai utopia, namun bagi tokoh pergerakan nasional sendiri gagasan-gagasan itu merupakan sebuah landasan awal menuju Indonesia yang dicita-citakan. Wacana itulah yang seringkali disebut sebagai Polemik Kebudayaan. Beberapa tokoh yang terlibat dalam polemik itu antara lain Sutan Takdir Alisyahbana, dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, dan sebagainya. Sutan Takdir Alisyahbana misalnya berpendapat bahwa kebudayaan Indonesia di masa yang akan datang adalah kebudayaan yang harus berbeda dengan pra-Indonesia. Kebudayaan Indonesia terutama harus dikembangkan dari elemen-elemen kebudayaan Barat yang bersifat *egoistisch*, *materialistisch*, dan *intellectualistisch*. Indonesia baru harus tercerabut dan tidak berakar dari kebudayaan pra-Indonesia. Hanya dengan cara demikian, katanya, Indonesia akan dapat maju seperti Eropa, Amerika, dan Jepang.¹⁷ Sementara itu dr. Sutomo berpendapat bahwa kebudayaan Indonesia di masa yang akan datang perlu dikembangkan dari kebudayaan daerah yang memiliki nilai positif. Demikian juga kebudayaan Indonesia di masa yang akan datang bisa mengambil dari elemen kebudayaan Barat yang positif seperti intelektualisme.

¹⁶ Barangkali sulit untuk membuat kategori antara politisi dan budayawan pada waktu itu. Para politisi biasanya juga memiliki wawasan budaya yang luas, demikian juga sebaliknya.

¹⁷ Sutan Takdir Alisyahbana, “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru: Indonesia-Pra-Indonesia”, dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan: Pokok Pikiran St. Takdir Alisyahbana, Sanusi Pane, Dr. Poerbatjaraka, Dr. Sutomo, Tjindarbumi, Adinegoro, Dr. M. Amir, Ki Hajar Dewantara* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), hlm. 13-21.

Namun demikian intelektualisme perlu dilandasi oleh kebijakan dari nilai-nilai tradisional.¹⁸ Hal senada juga dikemukakan oleh Ki Hadjar yang menganjurkan masa lalu masyarakat Indonesia tidak ditinggalkan begitu saja sebagai referensi kultural di masa kini. Oleh sebab itu dia membayangkan bahwa kebudayaan Indonesia di masa yang akan datang dapat dikonstruksikan sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah.¹⁹

Polemik Kebudayaan yang berkembang pada tahun 1930-an tersebut menjadi sesuatu yang monumental. Hal itu bukan karena hasilnya yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia pada waktu itu tetapi makna polemik itu justru terletak pada peletakan fondasi dialog dalam menentukan wajah kebudayaan Indonesia yang dicita-citakan di masa yang akan datang. Kebudayaan Indonesia ataupun Kebudayaan Nasional Indonesia di masa yang akan datang perlu didialogkan dan hal ini berarti bahwa perlu ada *grand design* untuk melakukan rekayasa terhadap kebudayaan Indonesia di masa depan. Hal ini diperlukan justru karena sifat “ramuan dasar” dari kebudayaan Indonesia yang sangat plural. Aspek dinamika dari pemikiran mengenai kebudayaan Indonesia itu pula yang menyebabkan polemik kebudayaan ini menjadi semacam “*unfinished project*”, menjadi “harapan abadi” dan menempatkannya sebagai *imagined culture*.

Polemik Kebudayaan yang berkembang tahun 1930-an harus berhenti dengan meletusnya Perang Pasifik yang disusul dengan kekalahan Belanda dan didudukinya Hindia Belanda oleh balatentara Jepang sejak 1942 hingga 1945. Selama masa pendudukan Jepang, rekayasa kebangsaan dan kebudayaan dipupuk melalui peperangan dan agitasi para pemimpin politik dan militer yang secara langsung membangkitkan semangat “kami” (Indonesia) melawan “mereka” (para kolonialis Barat). Masa pendudukan Jepang merupakan masa yang luar biasa dalam proses pemupukan kesadaran politis sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Di samping itu, zaman Jepang juga memiliki andil yang besar dalam proses formasi kebudayaan Indonesia terutama yang terkait dengan semangat anti-kebudayaan Barat dan kepercayaan diri atas kebudayaan Timur sebagaimana yang dicontohkan oleh Jepang, meskipun di sana-sini mulai timbul juga perpecahan internal yang bersumber dari perbedaan ideologis. Satu hal yang sangat menonjol pada periode ini adalah *image* yang diterima oleh masyarakat Indonesia mengenai peran negara yang sangat besar dalam mengatur kehidupan bersama. Hal ini sesuai dengan paham fasisme yang dianut Jepang. Oleh sebab itu bisa dipahami jika semangat semacam itu juga bisa dengan mudah dijumpai dalam UUD 1945 yang dilahirkan pada zaman Jepang. Dalam naskah Pembukaan UUD 1945 diamanatkan: “...pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Bahkan tugas untuk membangun kebudayaan nasional Indonesia di masa depan juga merupakan tugas negara melalui pemerintah. Dalam Pasal 32 dikatakan: “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.

¹⁸ Sutomo, “Nationaal-Onderwijs-Congres: Menyambut Pemandangan Tuan S.T.A.”, dalam Mihadja, *Ibid.*, hlm. 43-51.

¹⁹ Abdul Hadi W.M., “Pemikiran Kebudayaan Takdir”, dalam: <http://www.ruangbaca.com/ruangbaca/?doky=MjAwOA==&dokm=MDI=&dokd=MjU=&dig=YXJjaGl2ZXM=&on=Q1JT&uniq=NjMz>

D. KEARIFAN LOKAL, KEBUDAYAAN NASIONAL, DAN KARAKTER BANGSA

1. Kearifan Lokal dan Perlunya Rekayasa Kebudayaan Nasional

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa masyarakat yang mendiami kepulauan Nusantara merupakan masyarakat yang plural baik dari sisi ras, etnik, agama, maupun status. Namun demikian, para *founding fathers* sudah menyadari tentang pluralitas diri ketika bersepakat untuk menjadi satu komunitas bangsa, yaitu apa yang disebut bangsa Indonesia. Bahkan bisa dikatakan bahwa justru karena kesadaran terhadap pluralitas diri itulah yang menjadi salah satu pendorong yang kuat bagi mereka untuk berkeinginan menjadi satu bangsa. Hal itu sudah diformulasikan secara formal pada tahun 1928, yaitu pada waktu Sumpah Pemuda. Pada waktu itu belum banyak terpikirkan bagaimana kedudukan budaya daerah ataupun budaya lokal dalam konstelasi Indonesia. Baru setelah pertengahan pertama tahun 1930-an pemikiran-pemikiran seperti itu muncul ke permukaan. Bahkan hal itu menjadi bahan debat publik yang dapat dilihat dari fenomena Polemik Kebudayaan. Perbedaan pendapat mengenai kedudukan budaya lokal dalam konteks kebudayaan nasional pun mencuat ke permukaan. Ada yang berpendapat bahwa kebudayaan nasional Indonesia harus diambil dari kebudayaan Barat yang sudah maju dalam rangka mengejar ketertinggalan dan bersaing dengan mereka. Kebudayaan nasional Indonesia tidak perlu terikat dengan kebudayaan pra-Indonesia yang berupa kebudayaan etnik.²⁰ Sementara itu pendapat lain mengisyaratkan bahwa kebudayaan lokal harus menjadi basis pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Terdapat juga gagasan yang kompromistis di mana kebudayaan nasional perlu mengambil bahan baik dari kebudayaan lokal yang *adiluhung* (puncak-puncak kebudayaan daerah) maupun dari unsur-unsur kebudayaan Barat yang positif.²¹

Kini setelah Polemik Kebudayaan berlalu lebih dari 80 tahun, derasnya pengaruh globalisasi dan dominasi kebudayaan Barat yang tidak terbendung, barangkali membuktikan bahwa harapan yang dibayangkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana pada tahun 1930-an telah menjadi kenyataan. Namun demikian justru dengan mengganasnya pengaruh kebudayaan Barat itulah muncul berbagai keinginan untuk tetap mempertahankan dan bahkan menghidupkan kembali kebudayaan lokal sebagai salah satu elemen jati diri bangsa Indonesia. Periode selama 80 tahun lebih pasca-Polemik Kebudayaan membuktikan bahwa jika negara menggelar arena pertarungan bebas, maka keberadaan kebudayaan lokal akan mengalami kehancuran. Konsekuensinya bahwa kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai bahan pendidikan karakter bangsa juga akan terkikis. Dalam hubungan itulah rekayasa dan strategi kebudayaan nasional Indonesia perlu digagas dan diimplementasikan jika ada keinginan untuk memberikan posisi yang penting bagi budaya lokal dalam pengembangan kebudayaan nasional dan menjadikannya sebagai bahan pembinaan karakter bangsa. Rekayasa kebudayaan nasional Indonesia perlu memiliki visi untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia modern yang berbasiskan kepada kearifan lokal yang dapat diramu dari budaya-budaya etnik yang sangat kaya. Untuk itu perlu dirumuskan strategi pencapaiannya melalui strategi kebudayaan.

2. Strategi Makro: di bawah Payung Indonesia

Strategi yang pertama yang perlu dilakukan bersifat makro dan tentu saja relatif bersifat abstrak, yaitu meneguhkan kembali (*reinforcement*) komitmen kebangsaan yang telah dirintis

²⁰ Alisjahbana dalam: Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm. 21.

²¹ Lihat misalnya Sanusi Pane, "Persatuan Indonesia", dalam: Mihardja, *Ibid.*, hlm. 22-30. Lihat juga K.H. Dewantara, "Pembaharuan Adab", *ibid.*, hlm. 115-118.

oleh para *founding fathers* yaitu keinginan bersama untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa. Dalam konteks ini, makna bangsa di sini lebih mengacu kepada aspek politik, sebab proses formasi bangsa Indonesia pada tataran awalnya lebih merupakan cita-cita politik daripada realitas dan cita-cita kultural. Di sini kesatuan politik sebagai sebuah bangsa yang hidup dalam sebuah negara lebih penting. Pembentukan bangsa Indonesia lebih didorong oleh keinginan untuk hidup bersama sebagai sebuah bangsa meskipun memiliki banyak perbedaan kultural. Bahkan justru karena perbedaan dan keberagaman itulah yang mendorong mereka untuk berhimpun sebagai suatu bangsa. Secara logis, keragaman kultural mestinya sangat ditoleransi di Indonesia. Jadi bisa dipahami jika terdapat semangat bahwa pengakuan sebagai bangsa Indonesia yang tergabung dalam wilayah teritorial dengan nama NKRI merupakan harga mati. Dengan demikian perbedaan budaya daerah apa pun seharusnya tetap mendapatkan ruang gerak dan pengakuan dalam masyarakat dan dalam sistem hukum nasional sejauh hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Selanjutnya sangat penting untuk mengaitkan payung Indonesia dengan sila-sila dalam Pancasila yang menurut para penggalinya dan para ahlinya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang telah berkembang berabad-abad di dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, meskipun sila Persatuan Indonesia merupakan sila dengan nomor urut tiga dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai sila kelima namun semestinya sila-sila ini dipakai sebagai bingkai dari semua sila yang lain. Artinya, orang Indonesia diberi kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dilandasi atas nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila-sila yang lain namun tetap dalam koridor persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bisa dipahami mengingat ketika agama dan kepercayaan serta ideologi tertentu tidak dibingkai dalam persatuan Indonesia maka akan berpotensi menimbulkan internasionalisme yang tentu saja akan menegasi keberadaan negara dan bangsa Indonesia.²² Demikian juga sila kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa bingkai keindonesiaan juga akan melahirkan berbagai persoalan mengenai standar yang berbeda antara nilai-nilai kemanusiaan yang dipandang universal yang kenyataannya bersumber dari kebudayaan Barat yang liberal dengan nilai-nilai budaya lokal yang dipengaruhi oleh berbagai unsur agama dan kepercayaan.²³ Implementasi sila demokrasi (sila ke-4) tanpa didasari dengan bingkai dan payung keindonesiaan juga akan melahirkan demokrasi yang “kebablasan” yang dapat mengancam integrasi bangsa dan negara Indonesia, apalagi jika demokrasi itu tidak dilandasi atas komitmen untuk menjaga persatuan nasional serta untuk mencapai kemakmuran dan keadilan masyarakat.²⁴ Dengan demikian, apapun perbedaannya asalkan masih dalam bingkai dan payung Indonesia baik sebagai bangsa maupun sebagai kesatuan wilayah NKRI maka hal itu tetap harus dihargai. Sebaliknya, apa pun perlu dikorbankan untuk menjaga keutuhan bangsa dan NKRI.

²² Sebagai contoh adalah gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan kekhilafahan global.

²³ Misalnya dapat dilihat dari kontroversi RUU Kesetaraan Gender yang terkait dengan kemungkinan diperbolehkannya perkawinan sesama jenis dengan dasar HAM yang bersifat universal. Lihat “RUU Kesetaraan Gender bertentangan dengan Islam”, dalam: <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/04/19/m2q761-ruu-kesetaraan-gender-bertentangan-dengan-syariat-islam> (Dukunungi tanggal 28 Mei 2012).

²⁴ Sebagai contoh, seandainya semua daerah diberi kebebasan atas nama demokrasi dan HAM untuk menyelenggarakan referendum, maka akan hancurnya bangsa dan negara Indonesia yang telah diwariskan oleh para *founding fathers*.

3. Hubungan Pusat-Daerah, Lokal-Nasional

Keutuhan bangsa Indonesia dan NKRI banyak bergantung kepada hubungan antara pusat dan daerah atau pun antara lokal dan nasional. Seperti diketahui bahwa meskipun negara Indonesia telah berdiri lebih dari enam dekade sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, namun sebetulnya formasi dari apa yang disebut sebagai bangsa dan komunitas Indonesia masih terus dalam proses. Artinya, "proses menjadi Indonesia" dalam konteks sosio-kultural masih terus berlangsung dan sulit diprediksikan kapan proses itu berakhir. Ben Anderson memformulasikan proses formasi komunitas dan bangsa Indonesia itu dengan konsep yang menarik, yaitu *imagined community* dan bahkan *imagined nation*.²⁵ Ini berarti bahwa yang disebut sebagai komunitas dan bangsa Indonesia merupakan sebuah masyarakat dan bangsa yang dibayangkan atau mungkin dicita-citakan yang berbeda dengan komunitas dan bangsa secara realitas. Tentu sebuah cita-cita memerlukan proses untuk mencapainya. Pencapaian sebuah cita-cita dan tujuan akan memberikan dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Jika berhasil, hal itu berarti ada sinkronisasi antara negara Republik Indonesia (RI) sebagai wadah dan komunitas ataupun bangsa sebagai isi. Sebaliknya, jika proses itu mengalami kegagalan maka proses pembentukan komunitas dan bangsa Indonesia itu tidak seiring dengan proses pembentukan negara RI yang pada gilirannya akan menyebabkan runtuhnya negara RI atau setidaknya-tidaknya apa yang disebut sebagai negara RI tidak sama dengan seperti ketika pertama kali berdiri tahun 1945, misalnya jika Papua, Aceh, Kalimantan memisahkan diri dari negara RI.

Proses menjadi komunitas dan bangsa Indonesia (*process to be Indonesian community and nation*) terkait erat dengan tumbuhnya rasa keindonesiaan atau rasa menjadi bagian yang inheren dari bangsa Indonesia dan bahkan ini juga terkait erat dengan rasa memiliki (*sense of belonging*) di setiap anggota komunitas bangsa Indonesia. Rasa memiliki (Jawa: *handarbeni*) terkait dengan perasaan mencintai (Jawa: *hanresnani*) dan kerelaan untuk mempertahankannya (Jawa: *hangrungkebi*) dari segala macam tantangan yang dipandang destruktif yang akan menghancurkannya. Munculnya gerakan untuk memisahkan diri dari negara RI, apa pun alasannya, barangkali merupakan sebuah refleksi bagaimana "*sense of Indonesianess*" masih di dalam persoalan yang serius.

Apa yang selama ini menjadi persoalan adalah bahwa fenomena resistensi daerah dan gerakan separatisme di berbagai daerah seringkali hanya dilihat dari perspektif "pusat" yang dalam hal ini adalah pemerintah RI di Jakarta. Setiap bentuk resistensi dan separatisme dipandang sebagai manifestasi sikap tidak loyal dan pengingkaran terhadap "konsensus luhur" dari para *founding fathers* yang telah merintis berdirinya negara RI. Logika kekuasaan pemerintah pusat seringkali didasari atas premis bahwa pemadaman terhadap setiap resistensi dan separatisme daerah merupakan sebuah misi untuk menegakkan "konsensus luhur" menegakkan negara RI. Jadi setiap tindakan represif pemerintah pusat mendapatkan justifikasi dari premis berpikir seperti itu. Dalam melakukan represi, hampir tidak pernah terdengar bahwa pemerintah pusat melakukan mawas diri untuk menjawab pertanyaan mengapa resistensi dan gerakan separatisme itu terjadi.

Adalah sangat menarik untuk melihat pertentangan perspektif lokal dan nasional ataupun antara daerah dan pusat dalam kaitannya dengan persoalan bagaimana negara RI itu dipertahankan. Pemerintah pusat tampaknya selalu menganggap bahwa proses-proses konsensus yang bermuara pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan sebuah konsensus final yang merupakan harga mati yang harus dipertahankan. Sejak tahun 2011, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sangat gencar untuk mensosialisasikan apa

²⁵ Benedict R. O'G Anderson, *Imagined community: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso, 1983), hlm. 224.

yang disebut sebagai empat pilar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Wacana NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 yang merupakan konsensus final sebetulnya sudah dikumandangkan para calon presiden pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2009. Ketiga calon presiden pada waktu itu, yaitu Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jusuf Kalla mengungkapkan dalam debat calon presiden bahwa NKRI merupakan konsensus final dan harga mati.²⁶ Beberapa hari setelah peringatan pidato hari lahir Pancasila, kembali mantan presiden Megawati menyatakan bahwa empat pilar berbangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, harus segera direvitalisasi kembali. Hal itu disampaikannya ketika melihat kelambanan pemerintah dalam menangani kasus NII (Negara Islam Indonesia) pada waktu itu.²⁷

Wacana bahwa NKRI sebagai konsensus final dan harga mati tersebut diyakini antara lain karena didorong oleh perasaan memiliki nasib yang sama sebagai masyarakat yang terjajah yang menginginkan sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi 1945. Dibayangkan pada waktu itu bahwa negara yang akan dibangun itu adalah negara yang mampu dan mau melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sudah menjadi semacam kontrak sosial. Seringkali tindakan represif pemerintah hanya didasarkan atas sebagian saja dari semangat itu, yaitu mempertahankan sampai titik darah penghabisan terhadap konsensus tahun 1945 itu, tanpa mau melihat apakah fungsi negara yang dicita-citakan itu sudah berjalan sesuai dengan konsensus dan harapan itu. Padahal dari perspektif daerah-daerah justru fungsi dan manfaat negara RI itu sendiri yang lebih penting, bukan kesepakatannya itu sendiri. Barangkali sering timbul pertanyaan apa untungnya ikut Indonesia jika harus dieksploitasi dan melarat. Bukankah tidak lebih baik untuk berdiri sendiri atau ikut bergabung negara lain yang lebih makmur dan adil?²⁸ Dengan demikian mungkin sudah waktunya bagi pemerintah pusat melakukan pendekatan kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan daripada pendekatan represif baik secara politik maupun militer. Kesadaran semacam ini yang perlu dibangun melalui narasi historis mengenai keindonesiaan. Kesadaran semacam ini sebetulnya juga merupakan bagian dari konsensus dan cita-cita luhur pada tahun 1945 itu. Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadi amnesia historis.

Tampak ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang tidak semua tertangkap oleh para elit pemerintahan bahwa rasa “keindonesiaan” dan nasionalisme tidak dapat lagi semata-mata dibangkitkan melalui romantisme sejarah, misalnya: dengan menyatakan bahwa “kita merupakan sebuah bangsa yang memiliki nasib yang sama sebagai bangsa terjajah” sebagaimana yang dulu sering didengung-dengungkan oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Sukarno.²⁹ Memang fenomena penjajahan itu pada umumnya dialami bersama oleh elemen bangsa Indonesia, meskipun tentu saja tidak semua kelompok sosial di kepulauan Indonesia pada waktu itu merasa dijajah. Pemerintah kolonial sendiri sengaja menciptakan sistem hukum yang “pilih kasih” yang didasarkan atas garis rasial dan status.

²⁶ ‘NKRI Harga Mati’, dalam: <http://mediacenter.kpu.go.id/berita/758-nkri-harga-mati.html> (Dikunjungi tanggal 25 Mei 2012).

²⁷ Mega: Revitalisasi Empat Pilar Berbangsa http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2011/05/09/224642/284/1/Mega_Revitalisasi_Empat_Pilar_Berbangsa_ (Dikunjungi tanggal 25 Mei 2012).

²⁸ Hal ini terlihat bahwa hampir setiap gerakan separatisme selalu memiliki dalih karena daerah yang bersangkutan merasa telah diabaikan dan dimiskinkan oleh pemerintah pusat.

²⁹ Menurut Anderson bahwa Presiden Sukarno secara sungguh-sungguh selalu menyatakan bahwa 350 tahun kolonialisme telah melahirkan Indonesia. Anderson, *Imagined Community*, hlm. 224.

Dengan cara begitu, mereka mencoba untuk menciptakan masyarakat kolonial dengan semangat *apartheid*. Dalam Pasal 109 Peraturan Pemerintah (*Regeering Reglement*) tahun 1854 misalnya, ditetapkan adanya pembedaan golongan masyarakat: golongan Eropa dan orang-orang yang dipersamakan dengan Eropa di satu pihak, dan Pribumi di pihak lain. Pada awalnya kategori Pribumi juga mencakup orang-orang pendatang dari Asia seperti orang Cina, India, Arab, dan sebagainya. Namun kemudian mereka dipisahkan menjadi kelompok sendiri dengan sebutan golongan Timur Asing yang menduduki kelas kedua setelah golongan Eropa. Ini berarti bahwa kriteria etnik dan ras dijadikan dasar dari struktur hukum masyarakat kolonial.³⁰ Jadi pada waktu itu masyarakat Indonesia memang sedang menghadapi ketidakadilan struktural yang sengaja diciptakan oleh penguasa kolonial yang menempatkan rakyat pribumi pada posisi yang paling hina dalam struktur masyarakat kolonial. Secara kultural, kebijakan semacam ini telah menjadikan rakyat pribumi mengidap *minderwardigheidscomplex*, semacam sindrom rendah diri yang kronis. Mereka yang memiliki keturunan dan status yang diuntungkan oleh sistem kolonialisme tentu saja tidak merasa terjajah dan bahkan ikut merasa menjadi penjajah. Kolonialisme telah menciptakan basis masyarakat yang penuh antagonistik. Sesungguhnya tidak semua elemen masyarakat Indonesia merasa terjajah pada waktu itu.

Dalam hal ini perlu dicatat bahwa perasaan senasib sebagai bangsa yang pernah dijajah itu bisa bersifat kontekstual. Barangkali dulu pada zamannya terutama pada generasi sebelum perang, perasaan keindonesiaan dapat ditumbuhkan hanya dengan romantisme sejarah semacam itu, namun pada saat ini ketika zaman telah berubah, generasi telah berganti, maka romantisme sejarah itu tidak dapat lagi sepenuhnya digunakan untuk melanggengkan rasa keindonesiaan. Banyak aspek praktis yang justru menjadi pertimbangan penting, yaitu bagaimana negara RI yang pernah diperlakukan sebagai hasil konsensus luhur yang dibela bersama itu mampu memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan kebanggaan kepada setiap warga negaranya. Keinginan itu merupakan hal yang sangat wajar. Sebagai bangsa yang pernah merasakan pahit dan getir penjajahan yang cukup lama, mereka membayangkan bahwa negara Indonesia yang menggantikan negara kolonial itu mampu memberikan kemakmuran secara ekonomi, kemerdekaan secara politik, dan *dignity* serta kebanggaan secara kultural sebagaimana yang pernah didung-dungkan oleh Bung Karno. Harapan-harapan sosialistik mengenai tujuan negara baru yang hendak didirikan sangat mewarnai ide para *founding fathers* ketika mereka mempersiapkan berdirinya Republik Indonesia.³¹

Problematika aktual lain yang selama dekade terakhir ini semakin menggejala adalah berkembangnya sentimen kedaerahan, isu tentang putra daerah, etnisitas, konflik agama, yang semuanya itu tampaknya juga merupakan antesenden bagi proses formasi keindonesiaan. Selama periode reformasi ini mungkin tidak terhitung jumlah kasus konflik mulai dari konflik antarkelompok sosial dan etnik serta agama hingga gejala pembersihan etnik.³² Sudah barang tentu secara deduktif orang bisa berdalih bahwa fenomena sosial seperti itu sulit terjadi jika keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran dapat dirasakan oleh masyarakat dan rasa keindonesiaan dimiliki oleh segenap elemen masyarakat Indonesia.

³⁰ Lihat V.J.H. Houben, 'Java in the 19th Century: Consolidation of A Territorial State', dalam: Howard Dick, *The Emergence of A National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000* (Leiden: KITLV Press, 2002), hlm. 61.

³¹ Singgih Tri Sulistiyono, "Oaring between Two Reefs: Globalization and the Dilema of the Reformation of Higher Education in Indonesia", makalah dipresentasikan pada *the International Symposium on the Cultural Changes in Asia at Toyo University* (Tokyo: 10 November 2007).

³² Lihat misalnya R.E. Elson, *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan* (terjemahan Zia Ansor) (Jakarta: Serambi, 2009), hlm. 433-434.

Dengan demikian dapat digarisbawahi beberapa persoalan aktual yang krusial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, antara lain bahwa berdirinya negara RI pada tahun 1945 sebagai suatu kesatuan politik yang formal belum sepenuhnya diikuti oleh proses formasi menjadi komunitas dan bangsa Indonesia sehingga rasa keindonesiaan pun masih menjadi persoalan. Berbagai kejadian yang berupa konflik antaretnik, resistensi, dan gerakan separatisme menunjukkan bahwa rasa keindonesiaan (andai sudah ada) pada situasi tertentu dan/atau untuk kepentingan tertentu masih dikorbankan demi kepentingan etnik, lokalitas, primordialisme, dan berbagai jenis kepentingan yang lain. Selain itu dalam sepanjang sejarah Indonesia, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan disintegrasi sosial-budaya dan nasional lebih menekankan pada pendekatan keamanan dan politik. Pendekatan keamanan dan represi justru akan menyebabkan disintegrasi bangsa secara politik dan “disindonesianisasi” secara sosial budaya. Dalam hal ini sudah waktunya bagi pemerintah sekarang untuk lebih menekankan pendekatan kesejahteraan dan keadilan dalam menyelesaikan konflik dan ancaman disintegrasi dan gejala “disindonesianisasi”.

Demikian juga penekanan secara politik dan militer serta indoktrinasi dalam menginternalisasikan perasaan keindonesiaan perlu diganti dengan pendekatan sosial budaya. Dalam hal ini semestinya pembelajaran sejarah kebangsaan di sekolah dan di berbagai lembaga pendidikan formal lainnya sangat penting. Persoalannya adalah materi pembelajaran sejarah yang seperti apa yang secara efektif mampu menumbuhkembangkan perasaan keindonesiaan, karena selama ini siswa-siswa di sekolah sudah mendapatkan pelajaran sejarah. Secara garis besar materi pembelajaran sejarah untuk mengembangkan rasa keindonesiaan adalah materi yang menggambarkan “*process to be Indonesia*”, sebuah proses yang panjang yang merupakan suatu *inevitably historical process* yang “mengharuskan” berbagai kelompok sosial dan etnik menjadi bangsa Indonesia, bukan bangsa lain.

Dengan demikian “*process to be Indonesia*” bukanlah baru dimulai sejak zaman pergerakan nasional, apalagi dimulai sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Narasi dan eksplanasi tentang “*process to be Indonesia*” perlu dimulai sejak zaman kuno hingga periode kekinian. Dekolonisasi 17 Agustus 1945 hanyalah merupakan salah satu tonggak terpenting saja dalam “*process to be Indonesia*” itu, yaitu berdirinya negara RI. Peristiwa itu hanyalah merupakan satu titik saja dari sebuah *evolutionary process* dari sebuah proses yang namanya “*a process to be Indonesian*” (sebagai komunitas dan bangsa). Tidak dapat dipungkiri memang kolonialisme sangat mewarnai “*process to be Indonesia*” itu terutama ketika para kolonialis Barat mengapling-ngapling batas-batas fisik dan politik siapa yang akan menjadi kawula Hindia Belanda (lalu menjadi warga negara Indonesia), siapa yang menjadi kawula British Malaysia (lalu menjadi warga negara Malaysia), dan sebagainya.³³ Namun sekali lagi peristiwa proklamasi kemerdekaan itu hanyalah merupakan sebagian kecil saja dari *long-term evolutionary process of being Indonesia*.

4. Strategi Mikro-Kultural

Jika strategi makro sebagaimana yang dijelaskan di atas lebih mengacu kepada konteks politik yang terkait dengan upaya untuk melakukan *reinforcement* mengenai komitmen luhur untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa, maka strategi mikro lebih mengacu kepada

³³ Menurut Ricklefs, Pemerintah kolonial Belanda tidak menciptakan Indonesia, mereka hanya menentukan batas-batas wilayah saja, lihat M.C. Ricklefs, *A history of Modern Indonesia since ca. 1300* (London: Macmillan, 1981), hlm. 138. David Henley mengatakan bahwa dengan menetapkan batas-batas wilayah, pemerintah Hindia Belanda telah menentukan siapa yang menjadi bangsa Indonesia dan siapa yang bukan, lihat David. Henley, *Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minahasa in the Dutch East Indies* (Leiden: KITLV Press, 1996), hlm. 5.

konteks kebudayaan yang terkait dengan upaya merumuskan wajah kebudayaan nasional Indonesia yang akan datang dan metode serta strategi sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai karakter kebangsaan tersebut ke dalam setiap warga negara. Dalam konteks rekayasa kebudayaan nasional Indonesia, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan perlu menggagas “*imagine culture*” bagi Indonesia yang akan datang dan bagaimana cara mewujudkan *imagine culture* itu. Sudah barang tentu kementerian ini dapat merekrut dan mendayagunakan pakar dan budayawan yang representatif untuk menggagas dan merumuskan *imagine culture* bagi Indonesia dengan menggunakan baik pendekatan historis maupun antropologis. Mengapa hal ini perlu dibebankan kepada pemerintah? Hal ini sesuai dengan amanah UUD 1945 bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia (Pasal 32). Lagi pula pemerintah dapat menganggarkan untuk kepentingan menjalankan amanah tersebut.

Selanjutnya, persoalan yang perlu dibahas adalah hal yang terkait dengan substansi kebudayaan nasional yang akan dibangun. Dengan melihat pada sejarah perjalanan budaya Indonesia sejak zaman Sumpah Pemuda hingga saat ini yang ditandai dengan makin derasnya ekspansi budaya Barat dan makin terkikisnya budaya lokal masyarakat Indonesia. Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rekayasa perwujudan kebudayaan nasional Indonesia di masa yang akan datang perlu menjadikan unsur-unsur budaya daerah yang merupakan *local wisdom* sebagai basis kebudayaan nasional Indonesia dengan diperkaya dan dimodernisasi dengan kebudayaan asing yang maju. Dengan demikian tugas dari Kemendikbud ataupun lembaga yang dibentuknya perlu mengkaji dan merumuskan *local wisdom* dari berbagai area budaya di berbagai wilayah di Indonesia. Sudah barang tentu wujud kebudayaan yang akan dibangun sebagai kebudayaan nasional Indonesia bisa mencakup baik kebudayaan sebagai ide, pola perilaku, maupun artefak. Dengan demikian rekayasa kebudayaan nasional Indonesia tetap harus memberdayakan *local wisdom* atau kearifan lokal yang barangkali bisa diperbandingkan dengan “istilah puncak-puncak kebudayaan daerah”. Jadi kebudayaan nasional Indonesia modern tetap berakar pada kebudayaan lokal. Dalam hubungan ini Kemendikbud perlu lebih serius melakukan inventarisasi dan kajian budaya-budaya lokal yang sekiranya, dengan menggunakan kriteria tertentu yang objektif dan rasional, dapat diangkat sebagai bahan untuk meramu apa yang disebut sebagai kebudayaan nasional Indonesia.

Mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimanakah posisi kebudayaan lokal ketika kebudayaan nasional Indonesia sudah mulai terwujud. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa negara harus menjamin keberadaan dan perkembangan serta perbedaan di antara budaya-budaya lokal yang masih berkembang sejauh selaras dengan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Budaya-budaya lokal itu dapat dipandang sebagai warisan pusaka kekayaan budaya Indonesia yang sangat unik yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pendukungnya. Jika konseptualisasi kebudayaan nasional itu sudah disepakati maka metode dan strategi sosialisasi dan internalisasi kebudayaan nasional itu perlu dipikirkan dengan baik agar kebudayaan nasional tidak semata-mata merupakan ranah kognitif yang hanya dihafalkan oleh anak-anak sekolah tetapi juga menjadi ranah afektif dan psikomotor yang betul-betul bisa dihayati dan diamalkan serta menjadi semacam “darah daging” setiap warga negara Indonesia.

E. CATATAN AKHIR

Pembangunan karakter sebagai bangsa yang besar merupakan suatu hal yang sangat fundamental untuk membangun sebuah bangsa yang maju. Hanya bangsa yang mampu membangun karakter yang kuat yang akan mampu menjadi bangsa yang jaya. Hal itu dapat